

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alfin Sulaiman, 2011, *Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Alumni.
- Bambang Sunggono. 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, Cetakan Pertama*, Jakarta: Konstitusi Press.
- La Ode Husen, 2005, *Hubungan Fungsi Pengawasan DPR Dengan BPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Bandung: CV.Utomo.
- Mardiasmo, 2000 *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andi.
- Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Gramedia.
- Moh. Mahfud MD, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Ni'matul Huda. 2012, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Saldi Isra, 2020, *Lembaga Negara; konsep, sejarah, wewenang, dan dinamika konstitusional*, Rajawali Pers, Depok.
- Satya Arinanto, 2006, *Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam era Pasca Reformasi*, Jakarta: UI-Press.
- Tampubolon, Robert, *Tampubolon, R. 2005. Risk And Systems Based Internal Audit*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Titik Tri Wulan Tutik, 2015, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Prenadamedia Group.

W. Riawan Tjandra, 2006, *Hukum Keuangan Negara*, PT. Grasindo, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi Atas Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Oleh Presiden, DPA, DPR, BPK, MA Pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

B. Website

Badan Pemeriksa Keuangan RI, 2017, Lampiran I Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017 Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, Jakarta.

Beni Kurnia Illahi dan Muhammad Ikhsan Alia, 2017, *Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama BPK dan KPK*, Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, 2017.

Bpk.go.id, “Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,” *bpk.go.id*, 2004.

BPKP, 1999, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Puslitbang BPKP, Jakarta.

Diky Anandya,dkk, 2022, Laporan Pemantauan Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021.

Dendy Sugono, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta.

ditjenpp.kemenkumham.go.id.

Firmansyah Arifin, 2005, *Lembaga Negara Dan Sengketa Kewenangan Antar lembaga Negara, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi (MKRI)*, Jakarta.

<https://papuabaratnews.co/>, “Korupsi dan Obral Status Opini WTP,”
<https://papuabaratnews.co/>, 2022.

<https://sumbar.bpk.go.id>.

Kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan negara. Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur. NTT.

Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2004 “Eksistensi Sistem Kelembagaan Negara Pascaamandemen UUD 1945”, Jakarta.

LAN-RI, 2011, *Modul Diklat LAN Teknik Pengelolaan Keuangan Negara*, LAN-RI.

Rahmatullah, “WTP dan Korupsi,” *Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI*,
<https://djb.kemenkeu.go.id/kppn/tanjungselor/id/datapublikasi/artikel/2865-wtp-dan-korupsi>.

T.M. Luthfi Yazid, “Komisi-komisi Nasional dalam Konteks Cita-cita Negara”.

